

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi masyarakat. Indonesia menerapkan *self-assessment system* yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran serta pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak yang memadai tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum dan prosedur administratif, tetapi juga kesadaran akan fungsi serta manfaat pajak bagi negara. Peningkatan literasi pajak diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela, sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam; sebagian menemukan hubungan positif signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan, sementara lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Faktor-faktor seperti motivasi, persepsi keadilan sistem pajak, atau sanksi juga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan.

Tingkat pendidikan turut menjadi variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak, meskipun dampaknya tidak selalu positif. Individu berpendidikan tinggi

memiliki peluang lebih besar untuk memahami pentingnya pajak, namun juga berpotensi memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban. Kepatuhan pajak sendiri mencakup ketepatan waktu pelaporan, akurasi perhitungan, dan kelengkapan administrasi. Dalam konteks instansi pemerintah, pegawai, khususnya di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran strategis sebagai teladan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan sikap positif terhadap pajak diyakini memperkuat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada aparatur sipil negara, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan kepatuhan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.”**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah ''Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur''.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diurai di atas maka persoalan penelitian: Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Orang Pribadi Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lain yang ingin meneliti hal serupa. Terutama bagi yang sedang membahas topik mengenai pajak, kepatuhan wajib pajak, atau literasi pajak. Skripsi ini juga bisa dijadikan contoh dalam

penyusunan tugas akhir yang membahas hubungan antar variabel dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa membantu menambah koleksi penelitian yang relevan di perpustakaan kampus, sehingga bisa berguna bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian di bidang perpajakan, baik di lingkungan ASN, UMKM, maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini bisa memperkuat teori-teori yang membahas hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menguji ulang teori-teori yang sudah ada dalam konteks yang berbeda, yaitu di lingkungan instansi pemerintah daerah. Dengan adanya data dan hasil yang diperoleh, penelitian ini bisa memberikan gambaran baru bagi pengembangan teori tentang perilaku wajib pajak orang pribadi dan bisa menjadi acuan untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama.